

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA PANTAI KENJERAN SURABAYA DAN KONFLIK NELAYAN

Jurnal Analisa Sosiologi

Oktober 2020, 9(2): 567-581

Amal Taufiq¹, Siti Azizah²

Abstract

The focus of this research is the conflict that occurred between the fishermen of Tambak Wedi Kenjeran Surabaya and PT PP Properti Suramadu, which represents the Surabaya city government as a result of government policies in developing the Kenjeran Beach tourism area, especially in the cable car development plan. This study used a qualitative approach, so that in the data mining technique the researcher used the method of observation, in-depth interviews, and documentation. From the research results, it was found that the Kenjeran beach tourism development policy carried out by the Surabaya City Government was in accordance with the natural and socio-cultural potential of the local community, but the impact of this policy was a conflict which in Ralf Dahrendorf's perspective there were three groups involved in the conflict. namely quasi groups, interest groups and conflict groups. The conflict started because of the demolition of a fishing post which had been used to monitor boats, three posts were dismantled, a fishing post for cumi-cumi group, kakap merah group and dorang groups, due to massive protests from fishermen until finally there was mediation by the Surabaya legislative, finally a fishing post was built. reset at the same location.

Keywords: Tourism Area Development, Government Policy, Fishermen

Abstrak

Fokus dalam penelitian adalah konflik yang terjadi antara nelayan Tambak Wedi kecamatan Kenjeran Surabaya dengan PT PP Properti Suramadu yang mewakili pemerintah kota Surabaya sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata Pantai Kenjeran terutama dalam rencana pembangunan Kereta Gantung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dalam teknik penggalan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan wisata pantai Kenjeran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan potensi alam dan sosial budaya masyarakat setempat, namun dampak dari kebijakan itu terjadi konflik yang dalam persepektif Ralf Dahrendorf ada tiga kelompok yang terlibat dalam konflik itu. yaitu kelompok semu, kelompok kepetingan dan kelompok konflik. Konflik dimulai karena adanya pembongkaran pos nelayan yang selama ini digunakan untuk memantau perahu, ada tiga pos yang dibongkar, pos nelayan kelompok cumi-cumi, kakap merah dan dorang, karena protes masif

^{1,2}Dosen Sosiologi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya

¹amal_taufiq@yahoo.co.id

dari nelayan hingga akhirnya ada mediasi oleh DPRD Surabaya, akhirnya pos nelayan dibangun ulang di lokasi yang sama.

Kata Kunci : Wisata Pantai; Kebijakan Pemkot; Nelayan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang kompleks, karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, politik, sosial budaya, dan ekonomi. *World Tourism Organization (WTO)* sebagaimana disampaikan oleh (A.J Muljadi, 2009). Pariwisata adalah berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain. Pengembangan wisata perlu memperhatikan beberapa poin yang berkaitan langsung atau tidak langsung. Terutama mengkaji kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam menumbuhkan *mindset* sektor pariwisata sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan kota berkelanjutan. Sektor fisik berkorelasi kuat dengan objek wisata dan ketersediaan infrastruktur pendukung.

Menurut (Gamal Suwanto, 1997) wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbeda dengan Suwanto, (A.J Muljadi, 2009) memandang bahwa sarana kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan kelangsungan hidupnya, tergantung dari wisatawan yang datang.

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan dengan tujuan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan tentunya juga dapat menjadi masukan devisa negara. pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional. Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,

dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa mendatang. (Fandeli, 2001) Sementara (Urry, 1990) pariwisata adalah aktifitas bersantai yang dilakukan oleh individu untuk mengunjungi objek wisata guna menghilangkan rasa jenuh akibat aktivitas rutin.

Suatu objek yang dibuka sebagai destinasi wisata benar-benar memiliki nilai jual. Seperti wisata pantai harus memiliki nilai lebih yang menjadi pembeda dari wisata-wisata pantai lainnya, yang dimaksud wisata pantai adalah wisata yang berada di kawasan pantai dan ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012)

Surabaya adalah salah satu kota besar kedua di Indonesia yang memiliki wisata pantai cukup panjang berbatasan dengan pulau Madura. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menganggap bahwa Surabaya bisa dipandang sebagai kota maritim selain kota metropolitan. Aanggapan ini dipengaruhi oleh keberadaan pantai yang berada di kawasan Utara dan Timur Kota Pahlawan yaitu, di kawasan Utara Surabaya, dari Barat sampai ke Timur terbentang pantai yang cukup indah yaitu pantai Kenjeran. Pemerintah kota Surabaya berusaha memanfaatkan kelebihan alam ini menjadi destinasi wisata yang sangat menguntungkan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya telah melakukan pengembangan Pantai Kenjeran untuk meningkatkan daya tarik wisatawan melalui program pembangunan infrastruktur serta sarana & prasarana yang antara lain meliputi : Pembuatan Air Mancur Menari, Pembuatan Jembatan Surabaya, Pembuatan Rumah Pohon & Flying Fox, Pembangunan Penataan PKL, Pembangunan Panggung Hiburan (Alfiyah Agustanya, 2012). Dalam rencana tata ruang wilayah kota Surabaya untuk tahun 2014 - 2030 kawasan pantai Kenjeran yang masuk UP Tambakwedi merupakan kawasan bahari (Poejooetami, 2017).

Pantai Kenjeran merupakan salah satu objek wisata yang menarik dengan dermaga panggungnya yang memanjang ke tengah laut, serta Kenjeran Park (Pantai Ria Kenjeran) yang memiliki beragam objek wisata

buatan, seperti *Water Park*, *Futsal Indoor*, *Fitness Center*, Sirkuit Motor, Pacuan Kuda, Taman Edukasi, Patung Budha, dan lainnya (Apridev Khomenie dan Ema Umilia, 2013). Objek dan daya tarik wisata itu dapat digunakan sebagai sasaran tujuan wisata rekreasi bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Konsep mengadopsi gaya desain *Industrial – Minimalism* yang mengangkat Surabaya sebagai kota industri diaplikasikan sedemikian rupa sehingga menyajikan objek wisata khas (Setiawan, 2016).

Destinasi wisata di pantai Kenjeran ini terlihat ramai, banyak wisatawan dalam dan luar kota mengunjungi kawasan pantai Kenjeran dan berfoto dengan latar Patung Suroboyo. Pengembangan kawasan pantai Kenjeran ini sering kali tidak dilaksanakan sendiri oleh Pemkot Surabaya, pemerintah menggandeng pihak swasta. Pada saat pembangunan patung Suro dan Boyo, Pemkot menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pelindo III. Pembangun Patung Suro dan Boyo ini memakan biaya sekitar Rp 1 miliar. Tinggi patung mencapai 25,6 meter dan berdiameter 15 meter. Pilihan tempat pembangunan patung Suro dan Boyo merupakan obsesi dari Tri Rismaharini ketika ada di tengah laut, maka Surabaya dapat terlihat dari ikon patung ini.

Patung Suroboyo ini menjadi penanda, tidak hanya penanda kota Surabaya, tetapi juga penanda rasa sayang dan komitmen sinergi Pelindo III pada pengembangan kota Surabaya. Patung karya seniman Bali, I Wayan Inten, itu dibangun secara 3 bulan di Bali. Lalu dikirim dalam bentuk potongan-potongan yang diangkut melalui peti kemas ke Surabaya untuk proses penyelesaiannya. Tidak hanya patung, kawasan di sekitar patung juga dibangun menjadi Taman Bulak seluas 4.000 meter persegi yang ditanami berbagai jenis tumbuhan sebagai penyeimbang ekologi kota.

Dalam konsep yang dikembangkan Pemerintah Kota Surabaya, kawasan wisata Kenjeran akan menjadi destinasi wisata yang terintegrasi. Patung Kenjeran yang dibangun Pelindo III akan menjadi ikon, taman Bulak akan menjadi ruang publik yang asri dan terintegrasi dengan Sentra Ikan Bulak (SIB) dan kampung nelayan. Jadi pengunjung taman dan pantai diharapkan bisa langsung membeli ikan segar, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi warga pesisir dan nelayan. Selain patung Surabaya

sebagai destinasi baru, pemerintah kota juga mengembangkan Surabaya North Quay di balkon terminal penumpang kapal laut, Gapura Surya Nusantara. Di destinasi maritim tersebut pengunjung dapat menikmati pemandangan Selat Madura, Jembatan Suramadu, Patung Jalesveva Jayamahe, hingga megahnya kapal pesiar internasional ketika ada yang sandar.

Dalam upaya untuk menambah daya tarik wisata pantai Kenjeran pemerintah kota Surabaya menambah spot wisata baru yaitu kereta gantung yang diharapkan bisa menjadi magnet kuat untuk memikat para wisatawan. Kematangan konsep objek wisata, ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung wisata telah disiapkan. Akses transportasi ke tempat wisata juga harus pula dipersiapkan sebaik mungkin karena wisatawan mau datang ke objek wisata jika aksesnya mudah dan fasilitas wisata bisa memuaskan atau menyenangkan. Aspek sosial-budaya menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian lebih, jika pengembangan wisata berbasis kepada kearifan lokal, maka akan menjadi modal keunikan yang membedakan dengan wisata lainnya walaupun objek wisatanya serupa, sebab nilai kultur yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tidak sama.

Atas pertimbangan itu, pengembangan wisata pantai Kenjeran dengan pembangunan kereta gantung memperhatikan kultur sosial masyarakat daerah pesisir. Keputusan pemerintah kota Surabaya akan membuat kampung nelayan sebagai ornamen yang memperindah lanskap dari kereta gantung sudah tepat, karena selain menikmati sensasi naik kereta yang berjalan di atas, wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan deretan-deretan rumah nelayan. Karena itulah pemerintah kota Surabaya melibatkan masyarakat setempat untuk pengembangan kawasan wisata di wilayah Utara. Kehadiran masyarakat dalam pengembangan wisata pantai akan menambah amunisi untuk memperlancar kebijakan-kebijakan dan memperkaya ide yang bisa ditumbuhkan sebagai pelengkap sarana dan prasarana yang bisa memuaskan para pengunjung.

Partisipasi masyarakat terhadap keberadaan obyek wisata yang ada di Surabaya merupakan hal yang cukup penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah obyek wisata. Keterlibatan masyarakat dalam

kegiatan pariwisata serta merta akan menumbuhkan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, salah satunya adalah mempromosikan pariwisata (Suriani, 2017). Sejauh penelitian ini dilakukan, beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengembangan wisata pantai dengan pembangunan kereta Gantung belum secara tegas menyatakan akan memfungsikan masyarakat setempat sebagai bagian dari pengembangan. Mereka hanya memastikan, masyarakat akan mendapatkan manfaat secara ekonomi dari pengembangan wisata kereta gantung. Unsur politik dalam implementasi kebijakan pemerintah juga perlu diperhatikan. Karena segala kebijakan program eksekutif perlu mendapatkan dukungan dari legislatif, baik dukungan dalam bentuk persetujuan atau sekadar pemberitahuan.

Dalam konteks pembangunan proyek prestisius pembuatan kereta gantung Tambak Wedi ini pemerintah kota Surabaya tidak menggunakan anggaran dana dari APBD. Pembangunan kereta gantung diketahui didanai oleh *Corporat Social Responsibility (CSR)* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pemerintah kota Surabaya seringkali memperoleh suntikan modal berupa CSR dari perusahaan-perusahaan dalam pengembangan wisata. Seperti pembangunan patung Suro dan Boyo di Taman Surabaya sama sekali tidak didanai dari APBD, tetapi dari CSR.

Sebenarnya pembangunan kereta gantung di Tambak Wedi tidak banyak menuai protes baik dari kalangan masyarakat nelayan maupun dari pihak legislatif, namun konflik yang muncul justru lebih karena PT. PP Properti Suramadu memutuskan untuk merobohkan pos nelayan yang dipakai sebagai sarana memantau perahu dari pinggir pantai, hal ini menyebabkan para nelayan sulit untuk melakukan pemantauan terhadap kapal-kapal mereka sebagai dampaknya muncullah konflik antara masyarakat nelayan dengan pemerintah kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh PT. PP Properti Suramadu sehingga pihak legislatif berusaha mencari resolusi konflik dan berperan sebagai penengah untuk mencari solusi antara nelayan dan PT. PP Properti Suramadu.

Untuk menganalisis konflik ini peneliti menggunakan persepektif teori konflik Ralf Dahrendorf. Ralf Dahrendorf adalah seorang sosiolog

Jerman yang lahir pada tahun 1929. Ia banyak menyadur teori kelas dan konflik kelas ke dalam bahasa Inggris. Dahrendorf adalah sarjana Eropa yang sangat memahami teori Marxian. Tetapi, bagian ujung teori konfliknya terlihat menyerupai cerminan fungsionalisme struktural ketimbang teori Marxian tentang konflik. Bagi Dahrendorf, (Zainuddin Maliki, 2003). Dahrendorf mengatakan bahwa masyarakat tak akan ada tanpa adanya konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu dengan yang lain. (Ritzer, 2012) Hal tersebut lah yang membuat Dahrendorf berpendapat bahwa teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian, yakni teori konflik dan teori konsensus. Dalam hal ini teori konflik berkedudukan sebagai tataan sosial yang dianggap sebagai manipulasi dan pengendalian dari kelompok dominan yang menganggap bahwa perubahan terjadi begitu cepat (Dahrendorf, 1986).

Konflik dapat menimbulkan adanya disintegrasi karena masyarakat tunduk pada proses perubahan dengan pertentangan yang saling beriringan, sedangkan konsensus merupakan suatu yang statis yang dapat menciptakan adanya persamaan nilai moral dan norma-norma dalam masyarakat yang dianggap penting bagi keberlangsungan dan perkembangan masyarakat, sehingga muncullah kerjasama antaranggota masyarakat dan dari situlah terjadi adanya integrasi (Surbakti, 1992).

Realitas kehidupan sosial ini yang mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi "otoritas" selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Hubungan Otoritas dan Konflik Sosial Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa posisi yang ada dalam masyarakat memiliki otoritas atau kekuasaan dengan intensitas yang berbeda-beda. Otoritas tidak terletak dalam diri individu, tetapi dalam posisi, sehingga tidak bersifat statis. Jadi, seseorang bisa saja berkuasa atau memiliki otoritas dalam lingkungan tertentu dan tidak mempunyai kuasa atau otoritas tertentu pada lingkungan lainnya. Sehingga seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam kelompok tertentu, mungkin saja menempati posisi superordinat pada kelompok yang lain. Sedangkan kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang yang berkuasa) dan orang yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan

bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain : kelompok semu (*quasi group*), kelompok kepentingan (*manifes*) dan kelompok konflik. Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga dalam kelompok akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawah (bawahan). Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, menurut Dahrendorf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan beberapa pertimbangan. pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga, metode ini lebih peka dan dapat lebih menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh melalui pertama, observasi dilakukan langsung tidak bisa diwakilkan karena peneliti harus melakukan pengamatan mendalam untuk mengetahui gambaran atau kondisi umum antara informan dan lingkungannya (Moleong, 2013) peneliti dituntut untuk mengamati segala aktivitas mereka dan berinteraksi serta memahami sikap dan perilakunya serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nelayan sehari-hari dalam melakukan aktivitas pekerjaannya, kedua, melalui wawancara kepada para nelayan Tambak Wedi yang tergabung dalam kelompok cumi-cumi, kelompok kakap merah, dan kelompok dorang. Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan anggota DPRD kota Surabaya. Kedua data sekunder yang merupakan

sumber data tambahan atau sumber data tertulis dapat di bagi atas sumber buku atau majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Teknik analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu pengamatan, wawancara dan selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kerangka analitis kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan kondisi latar penelitian secara menyeluruh. Proses analisa data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, sebab dalam tahap ini semua hasil penelitian yang di peroleh di lapangan dituangkan sekaligus pengukuhan pendapat, rumusan-rumusan atau hukum-hukum teoritik yang dibangun. Dalam analisa data peneliti tidak berbicara berdasarkan pengetahuan tetapi berdasarkan pada subyek yang ditelitinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Kenjeran

Pengembangan ekonomi dalam setiap pembangunan selalu menjadi landasan logis dari para pemangku kebijakan. Kebijakan program pembangunan di kawasan utara dengan pengembangan wisata pantai dan proyek Kereta Gantung bertujuan untuk menghidupkan kawasan pesisir yang dihuni oleh para nelayan terutama kelurahan Tambak Wedi yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal.

Dari pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya diketahui kelurahan yang paling luas di Kecamatan Kenjeran adalah Kelurahan Bulak Banteng dengan luas 2,67 Km dengan persentase luas sebesar 35% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran, sedangkan Kelurahan yang paling sempit wilayahnya adalah Kelurahan Tambak Wedi dengan luas 0,98 km dengan presentase 13% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Kenjeran. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Kenjeran memiliki ketinggian yang sama yaitu 2 meter, kecuali dengan Kelurahan Tambak Wedi yang memiliki ketinggian 1 meter (BPS, 2013).

Tambak wedi merupakan kelurahan terluar Surabaya dan berbatasan langsung dengan selat Madura potensi wisata pantai menjadi andalan kelurahan ini. Kondisi alam ini berusaha dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai wahana destinasi wisata yang dapat menghidupkan kondisi ekonomi. Wisata alamiah ini menjadi kelebihan tersendiri dari Kelurahan Tambak Wedi. Terlebih, akses transportasi sudah terbuka luas sejak dibangunnya jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura (Suramadu). Bahkan, potensi wisata pantai ini menjadi satu-satunya wisata yang bisa dikembangkan dengan baik. Karena berdekatan dengan pantai maka masyarakat Tambak Wedi mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kelompok nelayan Tambak Wedi terorganisir dengan manajemen nelayan yang terbagi dalam beberapa kelompok yang mengindikasikan bahwa nelayan memiliki kemampuan mengorganisir kegiatannya walaupun hanya sebatas pembagian kelompok, namun realitas itu menjadi bukti bahwa nelayan mampu mengimplementasikan aktifitasnya dengan baik.

Manajemen nelayan Tambak Wedi memang sederhana, hanya pembagian kelompok yang terpeta-petakan kepada empat kelompok nelayan. Empat kelompok ini ada yang mengidentifikasi diri dengan sebutan kelompok nelayan kerapu, cumi-cumi, dorang, dan kakap merah. Penamaan diri dengan meminjam nama-nama ikan ini menjadi simbol bahwa mereka adalah para nelayan yang menggantungkan hidup kepada laut beserta habitatnya. Pembagian kelompok nelayan ini ditandai dengan berbedanya tempat penambatan perahu yang digunakan sebagai sarana melaut. Jika dirinci, maka kelompok nelayan kerapu tempat parkir perahunya berada di RW 1, sedangkan tiga kelompok lainnya berada di RW 2 Tambak Wedi. Masing-masing kelompok ini mempunyai pos penjagaan atau pos pantau sendiri. Pos pantau ini berada persis di bibir pantai. Hal itu untuk memudahkan pemantauan perahu milik para nelayan. Anggota dari empat kelompok nelayan tidak terpeta-petakan menurut alamat domisili. Setiap nelayan bebas memilih menjadi anggota kelompok. Karena domisili tidak menjadi acuan nelayan tertentu harus menjadi anggota kelompok tertentu. anggotanya macam-macam, ada yang di RW 2 jadi anggota kelompok

nelayan Kerapu, ada yang sebaliknya, pembagian ini hanya memudahkan nelayan saja

Pengembangan kawasan wisata pantai Kenjeran dengan pembangunan proyek Kereta Gantung pada awalnya mendapat sambutan hangat dari masyarakat, namun dalam proses perjalanannya muncul gejolak di kalangan masyarakat Tambak Wedi dengan PT PP Properti Suramadu. Konflik ini tidak bisa dihindari karena para nelayan Tambak Wedi merasa terusik dengan proyek pemerintah kota Surabaya. Semula, memang para nelayan menyambut baik terhadap pembangunan kereta gantung karena akan ada hal baru yang akan menghiasi daerahnya, namun euforia ini tidak berlangsung lama setelah aset mereka berupa pos nelayan dirobohkan karena dipandang akan mengganggu pembangunan kereta gantung. Dampak lain dari pembangunan kereta gantung adalah lokasi penambatan perahu dari tiga kelompok nelayan, kakap merah, dorang, dan cumi-cumi terancam dipindah karena lokasinya berada persis di bawah lalu lintas yang akan dilewati kereta gantung. Kekhawatiran itu itu akan diuji saat pembangunan dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang di pinggir laut.

Pemerintah Surabaya sebenarnya mampu meredam konflik dengan nelayan karena pos yang dirobohkan akan diganti dengan pos yang baru. Pos baru ini direncanakan akan dibangun di lokasi yang berbeda karena di tempat lama tidak efektif lagi yang bisa menghalangi realisasi proyek pembangunan kereta gantung. Melalui PT. PP Properti Suramadu, pemerintah kota Surabaya berjanji membangun pos baru. Dengan janji ini gejolak para nelayan mereda dan mereka percaya akan memiliki pos nelayan yang lebih bagus.

Pembahasan

Konflik Nelayan Dalam Perspektif Dahrendorf

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan wisata pantai Kenjeran dimulai dengan tahapan pembangunan kereta gantung, dari awal para nelayan tidak pernah memperlmasalahkan pembangunan kereta gantung. Hal itu bisa dibuktikan dari sejarah penolakan warga. Dari awal perencanaan sampai pada tahapan sosialisasi pembangunan, warga selalu mendukung,

tapi ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembangunan kereta gantung yaitu pembongkaran pos pantau nelayan.

Pembangunan kereta gantung ini menuai protes dari kalangan nelayan Tambak Wedi karena PT PP Properti Suramadu memusnahkan pos nelayan yang dipakai untuk memantau perahu dengan dalih mengganggu pembangunan proyek. Padahal keberadaan pos pantau ini sangat berguna untuk mengontrol aktifitas para nelayan dari pinggir pantai. Pos pantau sangat berjasa kepada para nelayan. Nelayan Tambak Wedi sangat terbantu dari pos pantau saat memantau pasang surut laut, dan keamanan perahu. Hal ini berkorelasi dengan kelancaran para nelayan menjalankan aktifitasnya. Nelayan mudah memindahkan perahu menyesuaikan dengan pasang surut air laut dari keberadaan pos pantau, para nelayan Tambak Wedi cukup intens memberi penolakan.

Di sisi lain DPRD kota Surabaya juga tidak menolak terhadap pembangunan kereta gantung ini. Beberapa respon yang dilontarkan oleh legislatif sejauh pengamatan peneliti hanya dilatar belakangi oleh keputusan PT. PP Properti Suramadu yang merobohkan pos nelayan yang dipakai sebagai sarana memantau perahu dari pinggir pantai. Ada tiga pos yang dirobohkan dan dibangun lagi di tempat yang sama, pos nelayan kelompok *cumi - cumi*, pos nelayan *kakap merah* dan pos nelayan *dorang*. Konflik karena pembongkaran pos ini sebagai dampak pertama yang dirasakan para nelayan dari proyek pembangunan kereta gantung.

Realitas ini menjadi bukti relevansi teori Ralf Dahrendorf. Konflik warga dan penguasa ini mengindikasikan bahwa gesekan antara pemimpin dengan yang dipimpin masih terus terjadi. Masalahnya adalah pembongkaran pos yang disebabkan oleh pembangunan kereta gantung. Skala konfliknya melibatkan antara nelayan dan PT. PP Properti Suramadu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kota Surabaya. Sebagai solusi konfliknya adalah pos nelayan dibangun lagi di tempat yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, asumsi Dahrendorf tentang masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsesus menemukan wujudnya. nelayan Tambak Wedi bisa berada dalam situasi sepaham dan terkadang

berubah berada pada situasi konflik. Sebelum pembongkaran pos nelayan karena dianggap mengganggu pembangunan kereta gantung, nelayan Tambak Wedi dalam kondisi yang menjaga erat *equilibrium* atau keseimbangan sistem yang dijaga bersama oleh seluruh nelayan. Namun, saat proyek kereta gantung mulai direalisasikan, nelayan Tambak Wedi berubah kepada situasi yang penuh dengan konflik. Ketegangan ini berubah lagi kepada situasi normal atau keseimbangan setelah konflik berhasil diatasi.

Bagi Dahrendorf, konflik muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama. Dalam konteks ini, kepentingan pemerintah kota Surabaya membangun kereta gantung ternyata tidak memperhatikan kepentingan nelayan. Apapun alasannya, pembongkaran pos nelayan tidak bisa dipandang sebagai keputusan tepat. karena implementasi program pengembangan kawasan pantai Kenjeran dengan proyek kereta gantungnya tidak bisa mencerminkan integrasi nelayan dengan Pemkot Surabaya.

Konsekuensinya adalah muncul ketegangan diantara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan nelayan ingin aktifitasnya yang sudah dijalankan sejak lama tidak diganggu oleh siapapun, termasuk pemerintah kota Surabaya dengan PT. PP Properti Suramadu, namun di lain pihak pemerintah kota Surabaya memiliki proyeksi bahwa Tambak Wedi menjadi kawasan wisata pantai yang bisa terkoneksi dengan beberapa wisata yang sudah ada. Karena itulah proyek pengembangan wisata di Tambak Wedi ini harus bersinergi dengan kepentingan para warga, terutama nelayan yang notabene menjadikan selat madura sebagai ladang mata pencahariannya. Peleburan dua kepentingan nelayan dan pemerintah kota Surabaya ini perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum proyek kereta gantung dilanjutkan.

Diskursus tentang kelompok yang kerap terlibat dalam arena konflik oleh Dahrendorf dibagi kepada tiga tipe. Yakni kelompok semu atau *quasi group*, kelompok kepentingan dan kelompok konflik. Kelompok semu dicirikan sebagai pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, kelompok ini juga termasuk dalam

kelompok kepentingan, dan karena kepentingan inilah melahirkan kelompok konflik sosial.

Atas dasar keterangan di atas, PT. PP Properti Suramadu bisa dikategorikan sebagai kelompok semu. PT PP Properti Suramadu ini memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah kota Surabaya, yakni membangun kereta gantung sebagai wahana wisata di Tambak Wedi dan pantai Kenjeran. Kesamaan kepentingan ini akan membuat mereka berada dalam kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan. Selanjutnya membawa mereka dalam kelompok konflik. Sedangkan kelompok kepentingan adalah nelayan Tambak Wedi kelompok cumi-cumi, kelompok kakap merah, dan kelompok dorang dengan pemerintah kota Surabaya. Karena sama-sama menjadi kelompok kepentingan selanjutnya membawa mereka kepada kelompok yang ketiga, yakni kelompok konflik sosial. Konflik ini sebagai dampak dari proyek pemerintah kota Surabaya yang menyebabkan pos nelayan atau pos pantau tambak wedi dibongkar.

Dalam proses berikutnya para nelayan meminta bantuan kalangan DPRD Surabaya agar aspirasinya didengarkan oleh pemerintah kota Surabaya dan PT. PP Properti Surmadau. Beberapa kali dengar pendapat (*hearing*) antara pihak-pihak terkait, yakni nelayan, pekerja proyek pembangunan kereta gantung dan pemerintah kota Surabaya yang difasilitasi oleh komisi B DPRD Surabaya akhirnya disepakati pembangunan ulang pos pantau sebagai pengganti dari pos pantau sebelumnya.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya menghidupkan kawasan utara sebagai destinasi wisata pantai Kenjeran memang membawa manfaat secara finansial dan kemakmuran bagi masyarakat lokal seperti kehadiran kereta gantung ini bisa menamnah perekonomian warga, terutama warga Tambak Wedi. Mereka bisa dikaryakan sebagai operator atau karyawan wisata kereta gantung, selain itu masyarakat mempunyai jiwa enterpreneur dengan menghadirkan kreatifitas ekonomi di daerah wisata. Namun disisi lain kebijakan pemerintah kota itu juga memiliki dampak bagi masyarakat. Dampak awal yang sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya nelayan

Tambak Wedi adalah pembongkaran pos nelayan yang dipakai untuk memantau perahu dan aktifitas nelayan. Walaupun pada akhirnya dibangun ulang di lokasi yang sama, namun tenaga dan fokus nelayan terbelah dari yang hanya melaut akhirnya harus memikirkan agar pos dibangun kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J Muljadi. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Alfiyah Agustanya, T. Y. (2012). Pengembangan Obyek dan Daya tatrik Pantai Kenejeran Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Jawa Timur. (Studi Kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. *Majalah Ekonomi, Tahun XXII*(3 Desember 2012).
- Apridev Khomeinie dan Ema Umilia. (2013). Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Kenjeran Surabaya. *JURNAL TEKNIK POMITS*, 2.
- BPS. (2013). *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran*.
- Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisis Kritis*. Rajawali Press.
- Fandeli, C. (2001). *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Liberty.
- Gamal Suwanto. (1997). *Dasar-Dasar Pariwisata*. : . ANDI Yogyakarta.
- Moleong, J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Poejooetami, E. (2017). Penataan Kawasan Wisata Pandatai Kenjeran Surabaya Dengan Memadukan Aktiivitas Rekreasi dan Perdagangan. *Procerding Universitas Widya Kartika*.
- Ritzer, G. dan D. J. G. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Rajawali Pers.
- Setiawan, F. Y. dan A. P. (2016). Perancangan Interior Kenjeran Expo di Surabaya. *JURNAL INTRA*, 4.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Pustaka Utama.

- Suriani, N. E. (2017). Inovasi Young Community Based Initiatives Dalam Pariwisata Surabaya (Rasa Memiliki, Inovasi dan Keterlibatan Pemuda dalam Turut Mengembangkan Pariwisata Surabaya). *Jurnal Bisnis Terapan, 1, Nomor*(Desember).
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. (2012). *No Title Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. S. Graha Ilmu,.
- Urry, J. (1990). *The Tourist Gaze: Leisure and Travel In Contemporary Societies*. Sage Publiher London.
- Zainuddin Maliki. (2003). *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. LPAM.